

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85-100.
- Ball, R. (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals. *Journal of Accounting Research*, 277-323.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chandler, F. M., & Plano, J. C. (1998). *The public administration dictionary*. New York: John Wiley and Sons.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Hughes, O. (2012). *Public Management and administration: An Introductin*. London: Palgrave Macmillan.
- Humantarian Forum Indonesia. (2011). Pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan di Indonesia. Piramedia.
- Kurniawan, A., & Dewi, R. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah dan Akuntansi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2002). *Best Practices for Budget Transparency*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Dipetik 2015, dari <http://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. (2020). *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Republik Indonesia.

- Prasetyo, R., & Putri, S. (2021). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 55-72.
- Rahmawati, I., & Hidayat, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 12-29.
- Rasul, S. (2003). *engintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara (cet. ke-3)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.
- Rusdiana, A., & Nasihudin, M. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, S., & Nugroho, H. (2022). Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Keuangan Publik*, 50-68.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan. (2018). Pentingnya Transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Beberapa Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 98-112.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. (t.thn.). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Wijayanti, A. F., & Saputra, R. (2021). aktor-faktor yang mempengaruhi opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 45-62.
- World Bank. (2000). *Entering the 21st century: World development report 1999/2000*. New York: Oxford University Press.